



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Pasuruan

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
1. Pendahuluan	I
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Gambaran Umum OPD	I-4
D. Isu Strategis	I-5
E. Dasar Hukum	I-7
F. Sistematika Penyusunan	I-9
2. Perencanaan Kinerja	II
A. Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-5
3. Akuntabilitas Kinerja	III
A. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	III-30
4. Penutup	IV
Penutup	IV-1
Lampiran	

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk akuntabilitas dari seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah. Di dalam laporan ini memuat pengukuran kinerja beserta evaluasi terhadap pengukuran kinerja.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 telah menetapkan empat sasaran strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan empat indikator kinerja, yaitu :

1. Rasio ketersediaan pangan utama
2. % Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 - % Peningkatan produktivitas tanaman pangan
 - % Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan
 - % Peningkatan produktivitas tanaman sayur
 - % Peningkatan produktivitas tanaman hias
 - % Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
3. Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Ringkasan pencapaian sasaran 2024 seperti halnya tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan didukung program sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
- 2) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
- 3) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
- 4) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

- 5) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- 6) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 7) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
- 8) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
- 9) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
- 10) PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Manfaat Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah:

- ✓ Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang
- ✓ Bahan penyempurnaan pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan datang
- ✓ Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi stakeholder



BAB I

PENDAHULUAN

1. 3 Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan merupakan unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan membantu Bupati Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan kebijakan daerah dan pembangunan di bidang Pertanian dan perkebunan.

Selanjutnya sebagai unsur pendukung yang memberikan pelayanan teknis di bidang pertanian dan perkebunan maka di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan, harus berbasis pada tiga pilar yakni adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dari semua pihak (*stakeholders*). Sehingga pada setiap akhir tahun anggaran perlu disusun laporan kinerja sebagai suatu perwujudan dari pertanggungjawaban pengelola organisasi pemerintahan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai OPD yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Pasuruan

1. 2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki maksud dan tujuan yang penting dalam konteks akuntabilitas dan pengelolaan kinerja instansi. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud dan tujuan tersebut :

Maksud Penulisan LKjIP :

1. LKjIP bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, termasuk penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Ini mencerminkan komitmen instansi untuk transparan kepada publik dan pemangku kepentingan.

2. Evaluasi Kinerja: Dokumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja instansi selama periode tertentu, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan

Tujuan Penulisan LKjIP

1. Memberikan Informasi Kinerja yang Terukur : LKjIP bertujuan untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, sehingga mereka dapat memahami capaian yang telah dicapai serta rencana kinerja yang seharusnya.
2. Perbaikan Berkelanjutan : LKjIP diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam kinerja Dinas, dengan menganalisis hasil pengukuran kinerja dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.
3. Transparansi dan Partisipasi Publik : Dengan menyusun LKjIP, instansi pemerintah juga berupaya mewujudkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan, LKjIP merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.3 *Gambaran Umum OPD*

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 200 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- d. Pengembangan prasarana pertanian dan pengawasan penggunaan Sarana pertanian;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- f. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- g. Penyusunan program penyuluhan;
- h. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- i. Pengelolaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan Pertanian; dan
- l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait Dengan tugas dan fungsinya.

Komposisi personil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dengan berbagai macam disiplin ilmu yaitu Ekonomi, Ilmu Sosial, Manajemen, kehutanan dan Pertanian. Sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari I/d sampai dengan IV/c, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah / Orang	Strata Pendidikan					
1	Gol IV/c	1	-	-	-	-	-	1
2	Gol IV/a	6	-	-	-	-	2	4
3	Gol III/d	13	-	-	-	-	11	2
4	Gol III/c	4	-	-	-	-	4	-
5	Gol III/b	1	-	-	-	-	1	-
6	Gol III/a	3	-	1	-	1	1	-

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah / Orang	Strata Pendidikan					
7	Gol II/d	4	-	4	-	-	-	-
8	Gol II/c	10	10	-	-	-	-	-
9	Gol II/b	-	-	-	-	-	-	-
10	Gol I/d	-	-	-	-	-	-	-
11	Honorer	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		42	10	5	-	1	19	7

untuk PPPK yang ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan berjumlah 63 orang dengan rincian :

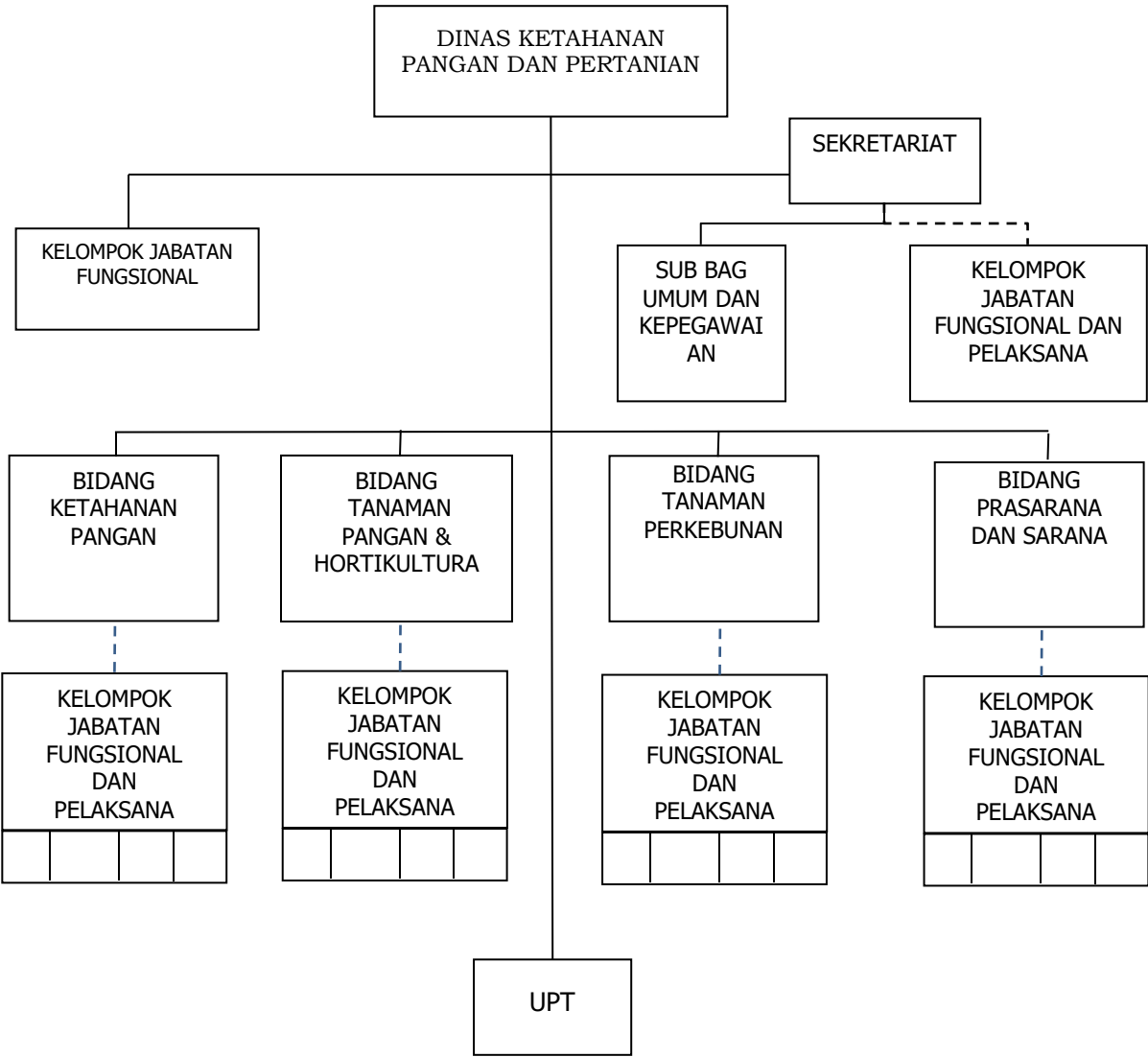
No	Pangkat/ Golongan	Jumlah / Orang	Strata Pendidikan					
			SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2
1	Gol V	18	-	18	-	-	-	-
2	Gol VII	45	-	-	-	4	41	-
3	Gol IX	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		63	-	18	-	4	41	-

Sedangkan untuk PNS Pusat yang ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan berjumlah 3 orang dengan rincian :

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah / Orang	Strata Pendidikan					
			SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2
1	Gol III/c	1	-	-	-	-	1	-
2	Gol III/a	1	-	-	-	-	1	-
3	Gol IV/b	1	-	-	-	-	1	
Jumlah		3	-	-	-	-	3	-

Struktur Organisasi

Gambar 2. Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan no. 183 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021



1. 4 Isu Strategis

Isu Strategis, adalah merupakan sebuah kondisi/perkembangan/ peristiwa/trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu Strategis tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan/bernuansa

negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Berdasarkan gambaran umum yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa isu strategis antara lain :

❖ Urusan Ketahanan Pangan

- a) Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan. Beralihnya fungsi lahan pertanian akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.
- b) Ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari beras masih tinggi
- c) Pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga belum optimal
- d) Dari hasil uji laboratorium beberapa sampel pangan segar, masih ditemukan residu pestisida pada bahan pangan segar, khususnya sayuran
- e) Masih dijumpai daerah rawan pangan dan gizi
- f) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan lumbung pangan yang berorientasi ekonomi

❖ Urusan Pertanian

- a) Manajemen usaha tani komoditas unggulan belum sepenuhnya dilakukan secara profesional sehingga belum bisa menjamin Kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk
- b) Kelembagaan petani masih belum optimal sehingga perlu diberikan bimbingan dan pendampingan
- c) Anomali iklim yang tidak bisa dikendalikan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman

- d) Jaringan pemasaran belum sepenuhnya bisa menyalurkan distribusi produk pertanian kepada konsumen.
- e) Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian
- f) Teknologi pertanian yang aplikatif dan spesifik lokasi belum sepenuhnya bisa diadopsi dan diterapkan oleh petani

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat terdapat beberapa hal :

1. Memberikan arahan secara berkala kepada seluruh pegawai atas kinerja yang telah direncanakan dalam SKP masing - masing pegawai untuk selanjutnya dapat memahami dan berkomitmen atas capain kinerjanya
2. Memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai terkait pentingnya hasil pengukuran kinerja guna evaluasi dan peningkatan capaian kinerja individu dan organisasi
3. Penyusunan dokumen laporan kinerja harus sesuai standart (peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 tahun 2021)
4. Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional/nasional/internasional (benchmark Kinerja) pada laporan kinerja (LKJiP)
5. Memenuhi dan menyajikan informasi kinerja atas dokumen laporan kinerja.

1. 6 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025
 6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024–2026
 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 184 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 200 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan;

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

1. 6 *Sistematika Penyusunan*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum
4. Isu Strategis
5. Dasar Hukum
6. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun N.
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2
 - c. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra
 - d. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

b. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja tahun N

2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya.

3. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya.

4. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2. 2 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 3 tahun ke depan. Pada akhirnya ditetapkanlah rencana dan target kinerja Rencana strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya.

Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Rencana Strategis meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Arah Kebijakan & Proyek Strategis Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 :

ARAH KEBIJAKAN		
2024	2025	2026
Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan.	Peningkatan Kualitas Sdm Dan Daya Saing Daerah	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

		Berkelanjutan
Proyek Strategis		
1. Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. Menciptakan Wirausaha Muda 1.000 Orang 2. Rintisan 10 StartUp Regional dan Nasional	1. Pengembangan Kawasan ekonomi perikanan 2. Pengembangan Kawasan ekonomi berbasis industry di Wilayah Timur 3. Jaminan perlindungan Kesehatan masyarakat (UHC) 4. Penambahan 20 Desa ODF 5. Penataan sumur BOR Artesis di Kawasan DAS Rejoso 6. Revitalisasi Kali Wрати (Bangil Tak) 7. Pembangunan RTH seluas 10 Ha 8. Penataan perkotaan Bangil 9. Pengadaan lahan jalan lingkar

Sedangkan target Renstra 2024 - 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO .	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			Masa Transisi
				PADA TAHUN KE -			
			2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(10)
1	Tujuan 1	Indikator Tujuan					
	Meningkatnya Keanekaragaman pangan	Pola Pangan Harapan	86,00	93,50	94,00	94,50	94,50
1.1	Sasaran	Indikator Sasaran					
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	rasio ketersediaan pangan utama	2,83	2,83	2,85	2,87	2,87
2	Tujuan 2	Indikator Tujuan					
	Meningkatkan Produksi subsektor pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
2,1	Sasaran	Indikator Sasaran					
	Meningkatnya Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan					
		- Peningkatan Produktivitas tanaman pangan	0,7%	0,7%	0,8%	0,90%	0,90%
		- Peningkatan Produktivitas tanaman buah tahunan	0,7%	0,7%	0,8%	0,90%	0,90%
		- Peningkatan Produktivitas tanaman sayur	0,7%	0,7%	0,8%	0,90%	0,90%

NO .	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			Masa Transisi
				PADA TAHUN KE -			
			2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(10)
		- Peningkatan Produktivitas tanaman hias	0,7%	0,7%	0,8%	0,90%	0,90%
		- Peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan	0,7%	0,7%	0,8%	0,90%	0,90%
2,3	Sasaran	Indikator Sasaran					
	Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase Jumlah produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	56,6%	61,11%	62,36%	63,61%	63,61%
2,4	Sasaran	Indikator Sasaran					
	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	82,9	83,1	83,3	83,5	83,5

1) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu satu sampai tiga tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh dinas dalam memenuhi tujuan dan sasaran selama kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan pernyataan tujuan kabupaten Pasuruan, tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya produksi sektor - sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah”.

2) *Sasaran*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan daerah

Dengan Indikator Rasio ketersediaan pangan utama

2. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Dengan indikator sasaran : Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan

- Peningkatan Produktivitas tanaman pangan
- Peningkatan Produktivitas tanaman buah tahunan
- Peningkatan Produktivitas tanaman sayur
- Peningkatan Produktivitas tanaman hias
- Peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan

3. Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi

Dengan indikator sasaran : Persentase Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Indikator Kinerja Utama

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 sebagai berikut :

N o	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Sumber Data	Penan ggung Jawab
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Rasio ketersediaan pangan utama	Rata -rata ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi rata -rata kebutuhan pangan utama per tahun (kg)	BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Peternak	Bidang Ketahanan Pangan

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				an, Perikana n	
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan %Peningkatan produktivitas tanaman pangan %Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan %Peningkatan produktivitas tanaman sayur %Peningkatan produktivitas tanaman hias %Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	$\frac{\text{Real prod th n} - \text{Real prod th n-1}}{\text{Real prod th n-1}} \times 100$ Real prod th n-1 Diperta/BPS	DKPP	Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, , Bidang Sarpras hasil pertanian, Bidang tanaman Perkebunan

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	$(\text{Jumlah komoditas unggulan pertanian/perkebunan yang terstandarisasi tahun } n / \text{Jumlah komoditas unggulan}) \times 100\%$	DKPP	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Tanaman Perkebunan
4	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Target Nilai Sakip Tahun berjalan dibagi Realisasi $\times 100\%$	DKPP	Bidang Sekretariat

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Di dalam perjanjian kinerja ini memuat program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta target yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan umum ditetapkan Penetapan kinerja adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi;

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<u>Tujuan I</u> Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	-	93,5
	<u>Sasaran 2.1</u> Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	-	2,83
2	<u>Tujuan II</u> Meningkatnya produksi subsektor pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	%	0.2
		Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	%	0.2
	<u>Sasaran 2.1</u> Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
		1.1 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	%	0,7
		1.2 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	%	0,7
		1.3 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	%	0,7

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		1.4 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	%	0,7
		1.5 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	%	0,7
	<u>Sasaran 2.2</u> Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	%	61,11
	<u>Sasaran 2.3</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	-	83,10



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka harus dilakukan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pada Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai 4 (Empat) sasaran strategis dan semuanya sudah direalisasikan.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun N

Prinsip pengukuran kinerja setiap organisasi pada dasarnya adalah :

- Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur
- Kerja yang tak diukur selayaknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan
- Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur
- Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil

- Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada data yang meliputi Rasio ketersediaan pangan utama, persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan persentase peningkatan kelompok tani agribis. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
1	<u>Tujuan I</u> Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	93,5	89,40	95,6%
	<u>Sasaran 2.1</u> Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	2,83	2,89	102,12%
2	<u>Tujuan II</u> Meningkatnya produksi subsektor pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	0.2%	NA	NA
		Persentase pertumbuhan	0.2%	NA	NA

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
		PDRB subsektor Perkebunan			
	<u>Sasaran 2.1</u> Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,7	0,75	106,7%
		➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	0,7	0,72	102,9%
		➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	0,7	0,80	114,3%
		➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	0,7	0,72	102,9%
		➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	0,7	0,75	107,1%
		➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	0,7	0,74	106%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
	<u>Sasaran 2.2</u> Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase Jumlah produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	61,11%	66,67%	109,1%
4	<u>Sasaran 2.3</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	83,10	83,20	100,12%

Tujuan pertama dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 93,5 dapat terealisasi sebesar 89,40, dengan capaian 95,6% dari target tersebut, hal ini menunjukkan bahwa belum ada kemajuan yang cukup signifikan dalam meningkatkan keberagaman pangan, meskipun masih ada beberapa ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Tujuan pertama didukung sasaran meningkatnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator Rasio ketersediaan pangan utama target 2,83 dapat terealisasi 2,89 atau sebesar 102,12%. Rasio yang mengalami peningkatan antara lain beras, gula, telur dan ikan.

Sedangkan untuk Tujuan ke dua meningkatnya produksi subsektor pertanian dengan indikator Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian dan subsektor Perkebunan masih menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan di awal tahun 2025. Tujuan kedua didukung sasaran kedua meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan

masing - masing indikator kinerja Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan, Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan, Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur, Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias, Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dapat terealisasi sebesar 0,75% dari target 0,7% atau sebesar 106,7%. Capaian tersebut didukung dari peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan yang mencapai 0,8% dimana produktivitas tanaman mangga mengalami peningkatan sebesar 0,36 kuintal/ha dibandingkan pada tahun 2023. Sasaran ketiga meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi dimana target pada tahun 2024 sebesar 61,11% dapat terealisasi sebesar 66,67% capaiannya sebesar 109,1%. Pencapaian realisasi kinerja sudah melampaui target disebabkan optimalnya kesadaran masyarakat atau kelompok tani yang mau menerapkan pengembangan mutu dan standarisasi hasil pertanian. Kemudian sasaran keempat Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 83,10 realisasi 83,20 dengan rincian Nilai Perencanaan kinerja 24,60 Pengukuran Kinerja 24,60 Pelaporan Kinerja 12,75 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal 21,25. Artinya menunjukkan adanya upaya yang serius dan efektif dalam meningkatkan transparansi, kinerja, dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan. Keberhasilan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam manajemen pemerintahan yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Selain itu Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2 (dua tahun sebelumnya) biasanya dilakukan untuk menilai perkembangan dan perbaikan dalam kinerja suatu program, proyek, atau sektor tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum yang bisa digunakan dalam membandingkan kinerja antara dua tahun tersebut.

Tabel 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan Tahun N-2

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N		
		2022	2023	2024
Tujuan I	Indek Ketahanan Pangan	77,4	79,87	-
Meningkatnya ketahanan pangan				
Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	-	-	89,4
Sasaran 2.1	Rasio ketersediaan pangan utama	2,7	2,83	-
Meningkatnya rasio ketersediaan pangan				
Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	-	-	2,89
Tujuan II	PDRB Sub Sektor Pertanian	3.691.771	4.507.445	-
Meningkatnya produksi subsektor pertanian				

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N		
		2022	2023	2024
	PDRB sub sektor perkebunan	1.112.318	1.126.316	-
	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	-	-	NA
	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	-	-	NA
Sasaran 2.1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan	-	-	-
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan	0,73	0,75	0,75

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N		
		2022	2023	2024
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	0,63	0,71	0,72
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	0,66	0,75	0,80
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	0,59	0,69	0,72
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	0,64	0,76	0,75
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman	1,12	0,85	0,74

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N		
		2022	2023	2024
	perkebunan			
Sasaran 2.2	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	44,44	61,11	66,67%
Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi				
Sasaran 2.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	82,9	83,05	83,2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024
Tujuan I Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	94,50	89,4
Sasaran 1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	2,87	2,89
Tujuan II Meningkatnya produksi subsektor pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	0,2	NA
	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	0,2	NA
Sasaran 2.1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,9	0,75

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	0,9	0,72
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	0,9	0,8
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	0,9	0,72
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	0,9	0,75
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	0,9	0,74
Sasaran 2.2 Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	63,61	63,16
Sasaran 2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	83,50	83,2

Dari tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra diatas menunjukkan hanya tujuan pertama dengan indikator Pola Pangan Harapan yang belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 93,5 terrealisasi sebesar 89,4 disebabkan oleh masyarakat mungkin belum sepenuhnya memiliki akses terhadap berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk mencapai angka target, misalnya karena distribusi pangan yang terbatas, harga yang tinggi, atau kesulitan dalam mendapatkan pangan tertentu. Rencana tindak lanjut dan solusi yang diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program edukasi yang lebih intensif mengenai pola makan sehat dan bergizi akan membantu masyarakat untuk memahami pentingnya konsumsi pangan yang beragam, termasuk cara memilih pangan yang bergizi namun tetap terjangkau dan melakukan pemantauan lebih ketat terhadap pelaksanaan program-program pangan bergizi, serta mengevaluasi secara berkala untuk mengetahui faktor penyebab ketidaktercapaian target, sehingga dapat dilakukan perbaikan di tahun berikutnya

3.1.4 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

TABEL 3.1.4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DENGAN STANDART NASIONAL

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024
		Provinsi	Nasional	
Tujuan I Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	93,86	93,5	89,4
Sasaran 1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	-	-	2,89
Tujuan II Meningkatnya produksi subsektor pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	NA	NA	NA
	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	NA	NA	NA
Sasaran 2.1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-	-	0,75

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024
		Provinsi	Nasional	
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	-	-	0,72
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	-	-	0,8
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	-	-	0,72
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	-	-	0,75
	❖ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	-	-	0,74
Sasaran 2.2 Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	-	-	94,73

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024
		Provinsi	Nasional	
Sasaran 2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	-	-	83,2

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Provinsi ataupun Nasional bisa dilihat dari tabel diatas dimana tidak semua Tujuan, sasaran Strategis yang digunakan pada DKPP Kabupaten Pasuruan digunakan di Provinsi dan Nasional. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan pangan di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan pola konsumsi pangan yang ideal bagi masyarakat, yang mencakup keberagaman pangan dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi, keberagaman sumber pangan, serta jumlah dan jenis pangan yang dibutuhkan untuk mencapainya status gizi yang optimal. Capaian indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Pasuruan mencapai 89,40 sedangkan Provinsi 93,86 dan Nasional 93,50, diharapkan Pola Pangan Harapan di Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan untuk mencapai angka yang lebih baik, mendekati capaian provinsi dan nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

TABEL 3.1.5

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tujuan I Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	93,50	89,40	95,6%
Sasaran 1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	2,83	2,89	102,12%
Tujuan II Meningkatnya produksi subsektor pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	0,20	NA	
	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	0,20	NA	
Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura	0,7	0,75	106,7%

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	dan perkebunan			
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	0,7	0,72	102,9%
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	0,7	0,80	114,3%
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	0,7	0,72	102,9%
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	0,7	0,75	107,1%
	➤ Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	0,7	0,74	106%
Sasaran 2.2 Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis	61,11%	66,67%	109,1%

yang terstandarisasi	yang terstandarisasi			
Sasaran 2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	83,10	83,20	100,12%

Tujuan I Meningkatnya Keanekaragaman Pangan

Sasaran I.I : “Meningkatnya ketersediaan pangan daerah ”

Tujuan satu meningkatnya Keanekaragaman Pangan dengan indikator Pola Pangan Harapan dengan target 93.50 hanya terealisasi 89,40 menunjukkan bahwa pencapaian masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari perspektif keberhasilan, capaian 89,40 mencerminkan upaya yang cukup signifikan dalam meningkatkan keanekaragaman pangan. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai mengadopsi pola konsumsi yang lebih beragam, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Langkah-langkah seperti diversifikasi pangan, peningkatan produksi pangan lokal, dan edukasi gizi kemungkinan telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian ini. Namun, dari sudut pandang kegagalan, selisih antara target dan realisasi menandakan masih adanya kendala dalam upaya mencapai Pola Pangan Harapan yang optimal. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kesenjangan ini antara lain:

- a) Preferensi Konsumsi Masyarakat – Masih tingginya ketergantungan pada sumber pangan pokok tertentu, seperti beras, dibandingkan dengan sumber pangan alternatif.
- b) Aksesibilitas dan Ketersediaan Pangan – Belum meratanya distribusi pangan yang beragam di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil.
- c) Kendala Ekonomi – Faktor harga dan daya beli masyarakat yang mempengaruhi kemampuan untuk mengonsumsi pangan yang lebih bervariasi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dapat melakukan berbagai langkah strategis untuk memperbaiki capaian tersebut. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a) Diversifikasi Pangan Lokal
 - Meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal non-beras seperti umbi-umbian, jagung, sagu, dan sorgum sebagai alternatif sumber karbohidrat.
 - Mendorong budidaya tanaman pangan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral seperti kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.
- b) Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan
 - Memperluas program lumbung pangan desa untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun.

- Memperkuat sistem distribusi dan pasar sehingga pangan beragam lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil.
 - Mendorong kemitraan dengan petani dan UMKM untuk meningkatkan produksi serta pemasaran produk pangan lokal.
- c) Penguatan Program Ketahanan Pangan Keluarga
- Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan buah melalui program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari).
 - Pelatihan pembuatan pangan olahan berbasis lokal agar dapat meningkatkan konsumsi sekaligus perekonomian masyarakat.

Sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja Rasio ketersediaan pangan utama. Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduktivitas bahan pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah, dan Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk. Penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama di dalam pelaksanaan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan bahan pangan domestik khususnya pangan utama sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat. Dengan menggunakan formula perhitungan data

ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi data kebutuhan pangan utama per tahun (kg), yang merupakan rata-rata ketersediaan beras, jagung, gula pasir, telur, daging dan ikan. Realisasi Rasio Ketersediaan Pangan pada tahun 2024 mencapai 2,89 rasio. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPD Tahun 2024 - 2026 sebesar 2,83 atau sebesar 102,12%. Analisis Keberhasilan dari tujuan pertama terkait capaian yang lebih tinggi dari target menunjukkan bahwa sektor ketersediaan pangan berhasil mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dengan baik. Rasio yang lebih tinggi ini menggambarkan pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun rasio ketersediaan pangan tinggi, kualitas dan aksesibilitas pangan untuk seluruh lapisan masyarakat belum tentu merata. Ada kemungkinan bahwa meskipun pasokan pangan cukup, distribusinya tidak merata di seluruh wilayah atau di kalangan masyarakat yang lebih miskin. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki tanggung jawab dalam merancang kebijakan pangan daerah yang selaras dengan tujuan ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini, mereka menyusun rencana yang jelas untuk mencapai target rasio ketersediaan pangan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026. Sasaran pertama didukung Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur, Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan, Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program Penanganan Kerawanan Pangan, kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengawasan Keamanan Pangan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana tindak lanjut mengidentifikasi area yang dapat lebih ditingkatkan meskipun sudah melebihi target. Fokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya dan proses yang ada, melakukan pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan mereka dapat terus mendukung pencapaian yang lebih tinggi, mempromosikan dan menyebarkan praktek terbaik atau inovasi yang telah terbukti efektif kepada unit atau tim lainnya, untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta Menetapkan mekanisme pemantauan yang lebih intensif untuk memantau keberlanjutan hasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Tujuan II Meningkatnya produksi subsektor pertanian

Sasaran II Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan"

Tujuan kedua meningkatnya produksi subsektor pertanian dengan indikator Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian dan Perkebunan dengan target 0.2 masih belum bisa merilis angka realisasi dikarenakan baru akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan pada bulan awal April tahun 2025.

Sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan. Pencapaian 0,75% dibandingkan target 0,7% menunjukkan bahwa ada peningkatan yang lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun peningkatannya

tidak terlalu besar, keberhasilan ini cukup berarti, karena menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas meskipun dalam tantangan yang mungkin dihadapi di sektor pertanian, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan faktor-faktor lainnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki peran penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi peningkatan produktivitas, seperti pemilihan varietas tanaman unggul, teknologi pertanian yang efisien, dan metode budidaya yang ramah lingkungan, Peningkatan Infrastruktur Pertanian, penggunaan benih unggul, alat mesin pertanian (alsintan) yang efisien, dan teknologi irigasi yang canggih, pemberdayaan petani melalui pelatihan, pendampingan serta harus memiliki strategi mitigasi risiko yang baik dalam menghadapi potensi bencana alam (seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama). Keberhasilan ini juga bisa mencerminkan upaya dinas dalam menanggulangi risiko yang dapat mengganggu produktivitas pertanian. Peningkatan kecil ini mungkin mencerminkan ketergantungan pada faktor eksternal yang sulit dikendalikan, seperti cuaca, perubahan iklim, atau harga pasar yang tidak stabil. Jika produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Untuk memudahkan perhitungan produktivitas maka indikator kinerja tersebut di detailkan menjadi peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan produktivitas tanaman buah, peningkatan produktivitas tanaman sayur, peningkatan produktivitas tanaman hias dan peningkatan

produktivitas tanaman perkebunan. Sasaran kedua didukung oleh Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.

Adapun analisis capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Persentase Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan

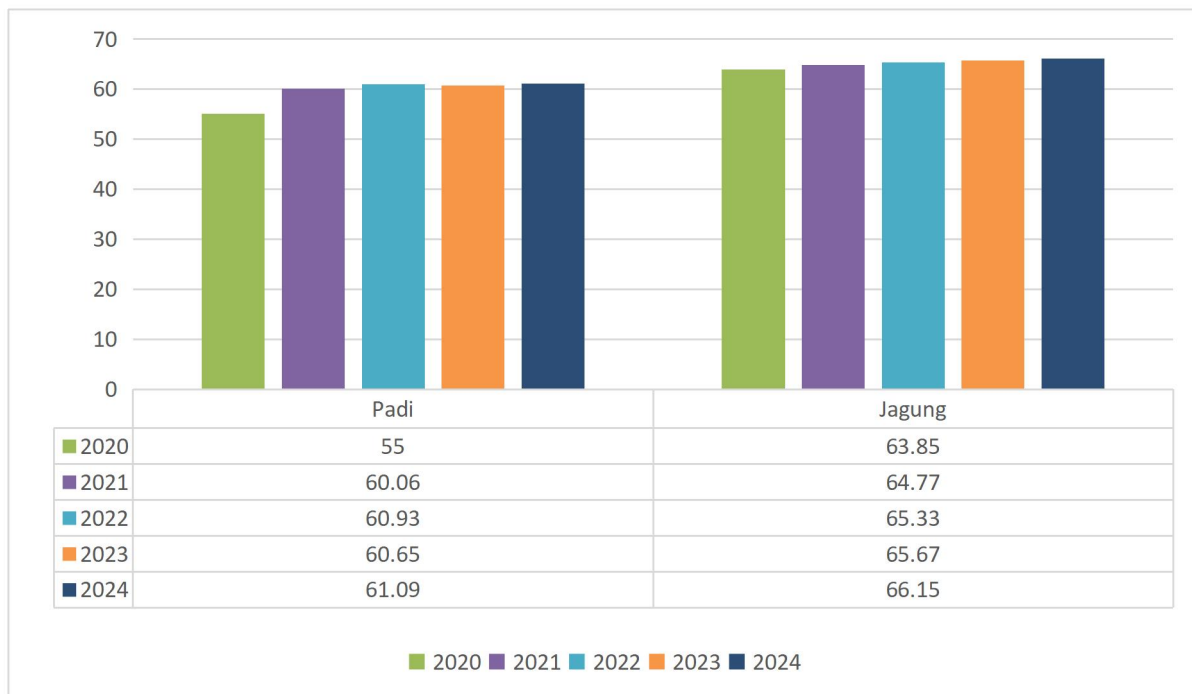
Tanaman pangan yang menjadi prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah tanaman padi dan jagung. Kedua komoditas ini merupakan bahan pangan utama yang dikonsumsi kebanyakan orang Indonesia sehingga ketersediaannya sedemikian penting dan harus ditingkatkan produktivitasnya.

Selain kedua komoditas diatas, tanaman kedelai juga merupakan tanaman pangan prioritas nasional. Namun demikian minat petani untuk menanam tanaman kedelai semakin berkurang karena produktivitas kedelai yang rendah dan harga yang kurang menjanjikan.

Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan tahun 2024 adalah sebesar 0.72% capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,7% yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 atau sebesar 102,9%

Produktivitas padi pada tahun 2024 sebesar 61,09 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan Produktivitas sebesar 60,65 kw/ha, Produktivitas jagung pada tahun 2024 sebesar 66,15 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan produktivitas sebesar 65,67 kw/ha Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tersebut. Adanya bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan alat mesin pertanian, Sekolah Lapang pengendalian Hama Terpadu, pembangunan jaringan irigasi tersier dan sumur bor merupakan alasan kenaikan produktivitas tanaman pangan yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas.

Gambar 2. Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung
Tahun 2020 – 2024



2) Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman buah

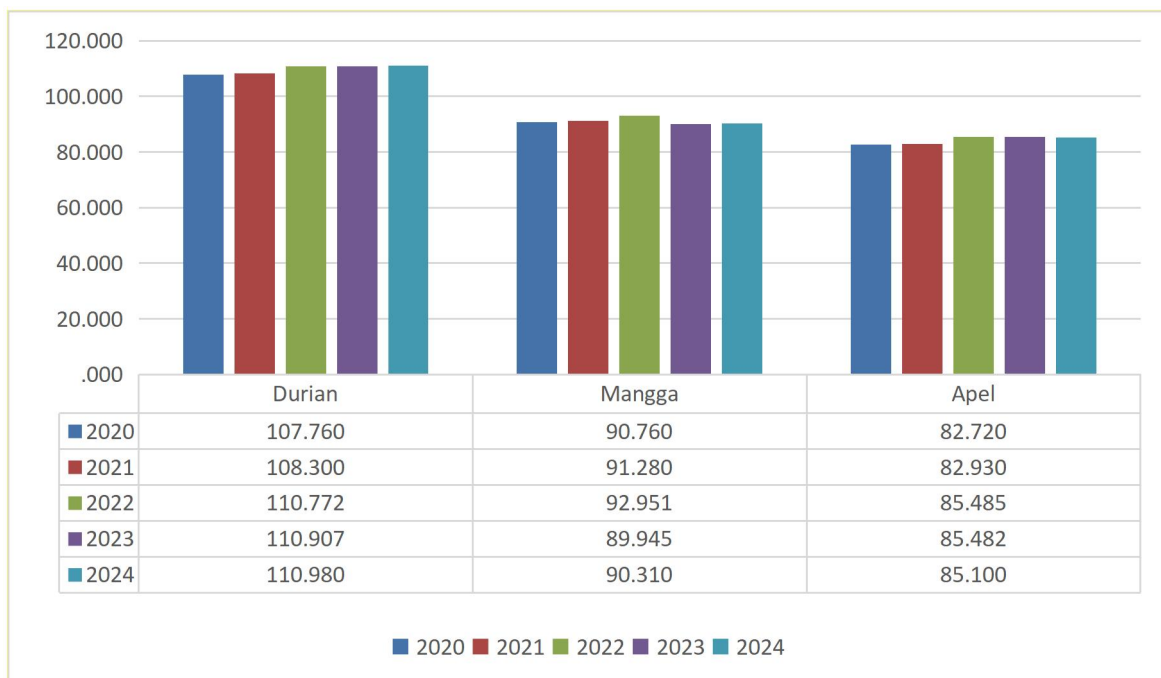
Komoditas unggulan jenis buah yang dikembangkan dan cocok dengan klimatologi kabupaten Pasuruan adalah mangga, apel dan durian. Ketiga komoditas ini menjadi primadona di pasaran buah-buah lokal karena masing-masing mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Untuk komoditas mangga yang menjadi unggulan adalah mangga gadung klon 21 atau biasa disebut mangga putar. Sedangkan buah durian yang ada di 8 kecamatan sentra masing-masing punya cita rasa yang tidak dimiliki di daerah lain. Adapun buah apel mempunyai lahan yang cukup luas sekaligus mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan sentra apel lain di Indonesia dan akan dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Apel di wilayah

Kabupaten Pasuruan untuk melindungi karakteristik khas, kualitas serta memberikan nilai tambah komersial terhadap produk apel di Kabupaten Pasuruan.

Persentase peningkatan Produktivitas tanaman buah tahunan tahun 2024 adalah sebesar 0,80%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,7% yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 atau sebesar 114,3%.

Produktivitas Apel pada tahun 2024 sebesar 85,10 kg/pohon meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan Produktivitas sebesar 85,48 kg/pohon (99,55%), Produktivitas Durian pada tahun 2024 sebesar 110,98 kg/pohon meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan Produktivitas sebesar 110,91 kg/pohon (100,07%), dan Produktivitas Mangga pada tahun 2024 sebesar 90,31 kg/pohon menurun dibandingkan tahun 2023 dengan Produktivitas sebesar 89,95 kg/pohon (100,41%). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan produktivitas pada ketiga komoditas tersebut. Keberhasilan pembuahan diluar musim (Off session) pada tanaman mangga, bantuan bibit mangga dan durian yang bersumber dari APBD kabupaten, bantuan pupuk organik pada tanaman apel serta kestabilan harga durian yang membuat petani durian termotivasi membudidayakan tanaman durian secara intensif merupakan alasan kenaikan produktivitas tanaman buah tahunan.

Gambar 4. Produktivitas Tanaman Mangga, Apel, Durian
Tahun 2020 – 2024



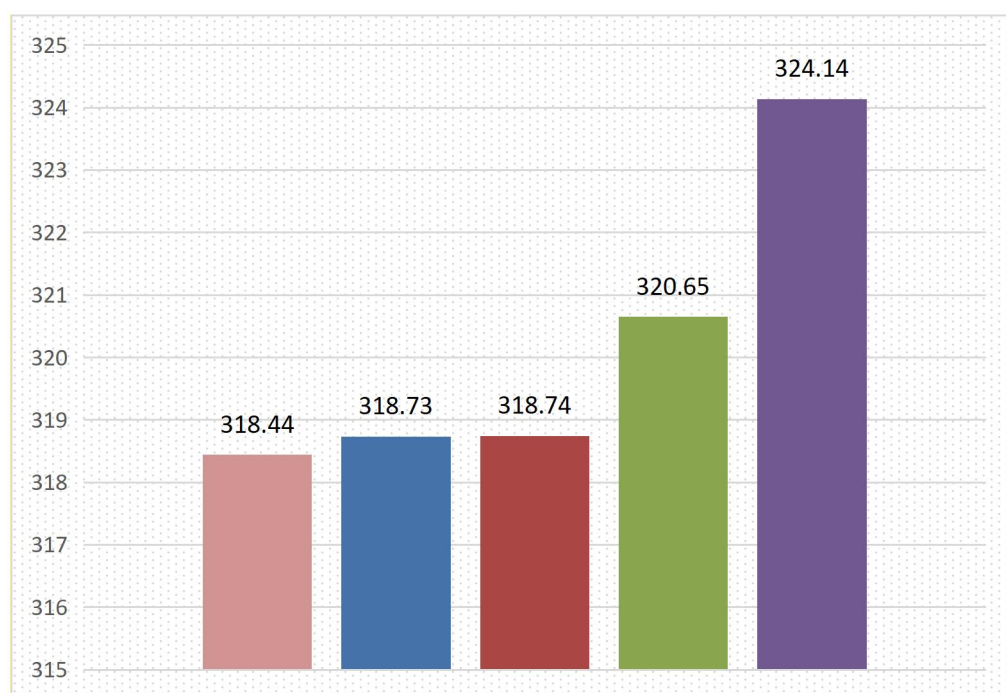
3) Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur

Kabupaten Pasuruan kaya akan bermacam-macam jenis sayuran. Tetapi saat ini yang menjadi prioritas adalah tanaman kentang dan Paprika. Kedua komoditas ini mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2024 peningkatan produktivitasnya ditargetkan sebesar 0,7% terealisasi sebesar 0,72%. Capaian ini melampaui dari target sebesar 0,7% yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 atau sebesar 102,9%..

Produktivitas Kentang pada tahun 2024 sebesar 364,12 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan produktivitas sebesar 362,84 kw/ha (100,35%) dan

produktivitas Paprika pada tahun 2024 sebesar 324,14 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan produktivitas sebesar 320,66 kw/ha (101,09%). Peningkatan produktivitas utamanya didukung oleh peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tanaman sayuran. Peningkatan luas panen disebabkan bantuan benih unggul bersertifikat pada tanaman kentang serta penggunaan sistem irigasi tetes (Drip Irrigation) pada tanaman Paprika dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Gambar 3. Produktivitas Tanaman Paprika
Tahun 2020 – 2024

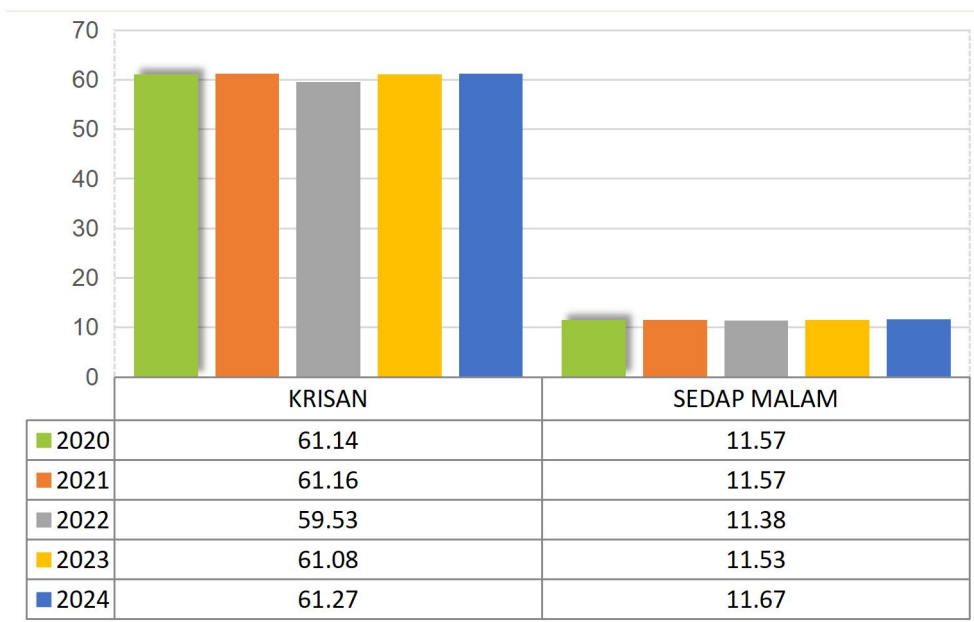


4) Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias

Komoditas andalan untuk tanaman hias di Kabupaten Pasuruan adalah Bunga krisan dan Bunga sedap malam. Pengembangan bunga krisan ada di

kecamatan Tukur sedangkan pengembangan bunga sedap malam ada di kecamatan Rembang dan Bangil. Terjadi peningkatan pada indikator Persentase peningkatan produktivitas tanaman hias tahun 2024 dimana terealisasi sebesar 0,75%, Secara umum produktivitas bunga krisan dan bunga sedap malam meningkat mencapai target yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 yaitu sebesar 0,7% atau capaian kinerjanya sebesar 107,1%. Produktivitas Bunga Krisan pada tahun 2024 sebesar 61,27 tangkai/m² sedikit ada peningkatan dibandingkan tahun 2023 dengan Produktivitas sebesar 61,08 tangkai/m² dan Produktivitas Bunga Sedap Malam pada tahun 2024 sebesar 11,67 tangkai/m² menurun dibandingkan tahun 2023 dengan Produktivitas sebesar 11,53 tangkai/m² atau capaian kinerjanya sebesar 101,20%.

Gambar 5. Produktivitas Tanaman Hias
Tahun 2020 – 2024



5). Persentase Peningkatan produktivitas Tanaman Perkebunan

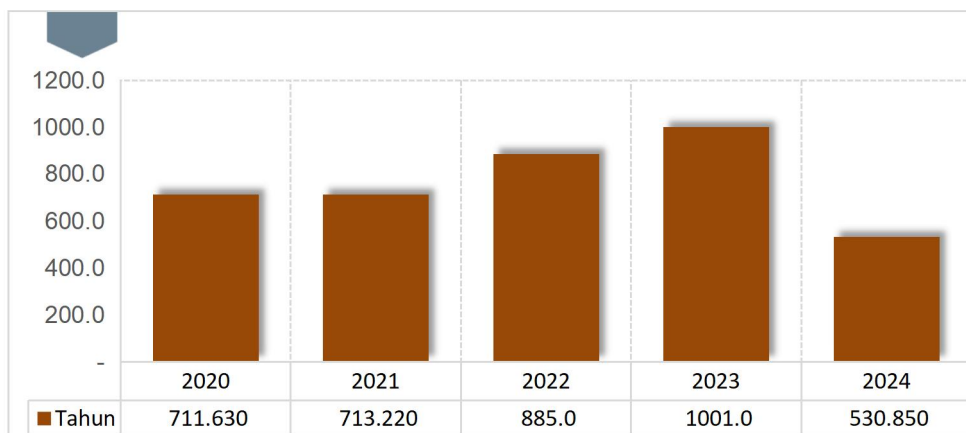
Komoditas perkebunan masih berpeluang cukup besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pasuruan, terutama komoditas kopi, cengkeh, tebu dan kelapa. Iklim yang sesuai dan ketersediaan lahan perkebunan adalah hal utama yang mendukung pengembangan komoditas ini.

Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan tahun 2024 dibanding tahun 2023 adalah sebesar 0.74%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,7% yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 atau sebesar 106%.

produktivitas Kopi pada tahun 2024 sebesar 530,86 kg/ha menurun dibandingkan tahun 2023 dengan produktivitas sebesar 1.001,38 kg/ha, produktivitas Cengkeh pada tahun 2024 sebesar 297,08 kg/ha menurun dibandingkan tahun 2023 dengan produktivitas sebesar 392,41 kg/ha. Produktivitas Tebu pada tahun 2024 yaitu sebesar 5.684,42 kg/ha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 6.666,87 kg/ha. produktivitas Kelapa pada tahun 2024 sebesar 3.033,36 kg/ha meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan produktivitas sebesar 1.760,84 kg/ha. Penurunan produktivitas pada beberapa komoditas seperti Kopi, cengkeh dan tebu pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan oleh perubahan iklim cuaca ekstrem, seperti kekeringan, curah hujan yang tidak terduga, atau perubahan suhu yang drastis, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Misalnya, cengkeh dan tebu sangat sensitif terhadap kondisi cuaca yang tidak stabil. Penyakit atau hama serangan hama atau penyakit tanaman dapat merusak hasil panen, mengurangi kualitas dan kuantitas produk. Penyakit pada tanaman cengkeh

atau serangan hama pada tebu bisa menjadi faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas. Kualitas dan Pemeliharaan Tanaman Penurunan produktivitas dapat terjadi jika ada masalah dalam pemeliharaan tanaman, seperti kurangnya pemupukan, irigasi yang tidak memadai, atau teknik pertanian yang tidak optimal. Kekurangan pada aspek-aspek ini bisa menurunkan hasil tanaman. Faktor Ekonomi Dalam beberapa kasus, perubahan harga atau pasar dapat mempengaruhi intensitas pengelolaan tanaman. Petani mungkin mengurangi perhatian pada komoditas tertentu jika harga jualnya tidak menguntungkan atau ada penurunan permintaan. Faktor Tanah, Kualitas tanah yang menurun karena pemakaian yang terus-menerus tanpa rotasi tanaman atau perawatan tanah yang cukup dapat menurunkan hasil panen. Tanah yang kekurangan unsur hara juga bisa menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas. Masalah Infrastruktur atau Teknologi Pertanian, Jika infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi, akses ke bibit berkualitas, atau alat pertanian modern terbatas, ini dapat mempengaruhi produktivitas. Kekurangan dalam teknologi atau teknik pertanian juga bisa menjadi hambatan bagi peningkatan hasil.

Gambar 6. produktivitas Kopi
Tahun 2020 – 2024



Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan produktivitas masih sangat terbuka lebar, baik untuk komoditas tanaman pangan maupun hortikultura. Hal ini dapat diupayakan melalui peningkatan produktivitas lahan dan produktivitas tenaga kerja. Secara konkret, dua hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan benih unggul, khususnya yang berasal dari bantuan pemerintah; peningkatan akses petani terhadap pupuk; penanganan serangan hama/OPT; penggunaan alat dan mesin pertanian (mekanisasi), baik prapanen maupun pasca panen untuk menekan kehilangan hasil produksi; perbaikan teknik budidaya, misalnya dengan mendorong implementasi pola tanam jagor legowo pada skala yang lebih masif dalam budidaya tanaman padi sawah; perbaikan dan perluasan akses jaringan irigasi; modifikasi cuaca untuk mitigasi dampak perubahan iklim; peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian yang difokuskan pada petani muda; penguatan kelembagaan petani melalui keanggotaan kelompok tani; dan peningkatan akses petani terhadap teknologi informasi.

Sasaran III : “Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi”

Sasaran III mempunyai indikator kinerja sebagai berikut, Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi dengan target 61,11% dapat terealisasi sebesar 66,67% atau mencapai 109,10% menunjukkan bahwa sebagian besar produk pertanian dan agribisnis di wilayah tersebut telah berhasil memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Secara keseluruhan, pencapaian 109,10% dari target dalam Sasaran III adalah sebuah keberhasilan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa program standarisasi produk pertanian

dan agribisnis telah berhasil diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif pada kualitas produk. Keberhasilan ini juga berpotensi meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar, serta mendukung keberlanjutan ekonomi petani dan pelaku agribisnis. Namun, tetap diperlukan perhatian untuk mempertahankan kualitas dan memperluas dampak positif ini di masa depan. Sasaran ketiga didukung oleh Program Penyuluhan Pertanian kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa ,Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian. Dari dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi melibatkan berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan, sertifikasi, dan pemberdayaan kelembagaan, hingga peningkatan pemasaran dan pemanfaatan teknologi. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan produk pertanian dan perkebunan Kabupaten Pasuruan akan lebih terstandarisasi, memiliki daya saing yang lebih tinggi, dan dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Standardisasi

dilakukan melalui pengamatan terhadap penerapan standarisasi di tingkat pelaku usaha serta pelaksanaan pengawasan dilapangan. Tindak lanjut dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas standarisasi yang sudah disusun dapat diimplementasikan/diterapkan di lapangan dan pembinaan mutu dapat lebih terarah sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Produk pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan perlu distandarisasikan sebagai jaminan atas mutu produk yang dihasilkan. Berdasarkan target RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 produk pertanian/agribisnis yang terstandarisasi adalah sebesar 61,11%. Capaian dari indikator ini adalah sebesar 103,3% dengan telah terstandarisasinya komoditas padi, mangga, kentang, kopi, Paprika, kentang, brokoli, paprika merah, bawang merah, jagung, wortel dari lembaga sertifikasi organik seloliman (LeSOS) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Pasuruan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual sebagai "organik" adalah diproduksi dan ditangani menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Sedangkan di tahun 2024 komoditas yang terstandarisasi adalah sedap malam.

Sertifikasi organik ini merupakan sarana untuk memberikan jaminan bahwa produk organik memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar melalui kegiatan survey dan inspeksi di lapangan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia (baik itu anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, maupun waktu) digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam konteks Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap unit sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pertanian, dan pengelolaan distribusi pangan yang lebih baik.

Tabel 3.1.6

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8 x 100)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Tujuan I</u>								
Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	93,50	89,40	95,61 %	764.111.550	596.349.885	78%	1,31

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8 x 100)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sasaran 2.1</u>								
Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	2,83	2,89	102,12%	764.111.550	596.349.885	78%	1,31
<u>Tujuan II</u>								
Meningkatnya produksi subsektor pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	0.2%	NA	NA	14.157.393.540	12.285.288.426	87%	0,86
	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	0.2%	NA	NA				
<u>Sasaran 2.1</u>								
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan,	Persentase peningkatan produktivitas	0,7	0,75	0,75	14.157.393.540	12.285.288.426	87%	0,86

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8 x 100)
		TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hortikultura dan perkebunan	tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan							
	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	0,7	0,72	0,72				
	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	0,7	0,8	0,80				
	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	0,7	0,72	0,72				
	Persentase Peningkatan produktivitas	0,7	0,75	0,75				

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8 x 100)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	tanaman hias							
	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	0,7	0,74	0,74				
<u>Sasaran 2.2</u>								
Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	61,11 %	66,67 %	109,1 %	85.004.900	62.371.375	73%	1,41
<u>Sasaran 2.3</u>								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	83,1	83,2	100,12%	27.410.896.008	23.860.524.182	87%	1,15

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8 x 100)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp. 42.417.405.998 dengan realisasi Rp. 36.804.533.868 atau capaian sebesar 86,77% dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.660.350	36.401.560	72%
1	<u>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>50.660.350</u>	<u>36.401.560</u>	<u>72%</u>
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	50.660.350	36.401.560	72%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	432.026.700	366.703.927	85%
1	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<u>113.688.000</u>	<u>100.438.050</u>	88%
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	27.000.000	24.140.500	89%
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	86.688.000	76.297.550	88%
2	<u>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</u>	<u>318.338.700</u>	<u>266.265.877</u>	<u>84%</u>
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5.823.000	5.645.000	97%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	312.515.700	260.620.877	83%
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	262.424.500	174.819.298	67%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<u>234.087.500</u>	<u>159.421.811</u>	68%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	234.087.500	159.421.811	68%
2	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<u>28.337.000</u>	<u>15.397.487</u>	54%
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	28.337.000	15.397.487	54%
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19.000.000	18.425.100	97%
1	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<u>19.000.000</u>	<u>18.425.100</u>	97%
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.000.000	18.425.100	97%
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	297.691.000	220.483.600	74%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<u>297.691.000</u>	220.483.600	74%
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	261.060.200	191.086.800	73%
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	36.630.800	29.396.800	80%
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.410.896.008	23.860.524.182	87%
1	<u>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>355.980.000</u>	<u>291.434.000</u>	82%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	291.075.000	269.449.500	93%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.500.000	-	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.025.000	3.980.000	40%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.380.000	18.004.500	40%
2	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>23.951.807.868</u>	<u>20.968.832.917</u>	<u>88%</u>

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.546.018.380	19.865.322.489	88%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.405.789.488	1.103.510.428	78%
3	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>584.669.200</u>	<u>442.862.808</u>	<u>76%</u>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.927.000	32.400.000	90%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.012.900	106.121.100	80%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.479.300	25.167.100	80%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.250.000	29.196.500	93%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.000.000	249.978.108	71%
4	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>771.745.500</u>	<u>709.081.668</u>	<u>92%</u>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	295.430.500	282.275.568	96%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	18.817.400	46%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.493.000	200.134.900	96%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.822.000	207.853.800	92%
<u>5</u>	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>981.177.000</u>	<u>905.710.000</u>	<u>92%</u>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	393.177.000	372.710.000	95%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.000.000	533.000.000	91%
<u>6</u>	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>733.516.440</u>	<u>530.602.789</u>	<u>72%</u>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	733.516.440	530.602.789	72%
<u>7</u>	<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	<u>32.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>38%</u>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.000.000	12.000.000	38%
VII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.005.219.740	7.421.888.862	93%
<u>1</u>	<u>Pembangunan Prasarana Pertanian</u>	<u>7.515.612.740</u>	<u>7.168.274.728</u>	<u>95%</u>

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.363.790.100	1.273.853.828	93%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.029.986.100	4.892.746.400	97%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.121.836.540	1.001.674.500	89%
<u>2</u>	<u>Pengembangan Prasarana Pertanian</u>	<u>489.607.000</u>	<u>253.614.134</u>	<u>52%</u>
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	346.561.000	166.959.134	48%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	143.046.000	86.655.000	61%
VIII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.901.798.900	2.252.332.481	78%
<u>1</u>	<u>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</u>	<u>2.901.798.900</u>	<u>2.252.332.481</u>	<u>78%</u>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.949.519.200	1.451.689.060	74%
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	952.279.700	800.643.421	84%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
IX	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.952.683.900	2.390.583.483	81%
<u>1</u>	<u>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</u>	<u>2.952.683.900</u>	<u>2.390.583.483</u>	<u>81%</u>
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.278.683.900	1.805.648.077	79%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	424.000.000	386.427.406	91%
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	250.000.000	198.508.000	79%
X	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	85.004.900	62.371.375	73%
<u>1</u>	<u>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>85.004.900</u>	<u>62.371.375</u>	<u>73%</u>
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	73.301.000	53.675.800	73%
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan	11.703.900	8.695.575	74%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Teknis Izin Usaha Pertanian			
	(1) JUMLAH ANGGARAN	42.417.405.998	36.804.533.868	86,77%

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu OPD disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran :

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sasaran I			
	<i>Meningkatnya ketersediaan pangan daerah</i>	<i>764.111.550</i>	<i>596.349.885</i>	<i>78,04%</i>
	Indikator :			
	<i>Rasio ketersediaan pangan utama</i>			
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.660.350	36.401.560	72%
1	<u>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>50.660.350</u>	<u>36.401.560</u>	<u>72%</u>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	50.660.350	36.401.560	72%
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	432.026.700	366.703.927	85%
1	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<u>113.688.000</u>	<u>100.438.050</u>	88%
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	27.000.000	24.140.500	89%
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	86.688.000	76.297.550	88%
2	<u>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</u>	<u>318.338.700</u>	<u>266.265.877</u>	<u>84%</u>
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5.823.000	5.645.000	97%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	312.515.700	260.620.877	83%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sumber Daya Lokal			
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	262.424.500	174.819.298	67%
1	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<u>234.087.500</u>	<u>159.421.811</u>	68%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	234.087.500	159.421.811	68%
2	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<u>28.337.000</u>	<u>15.397.487</u>	54%
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	28.337.000	15.397.487	54%
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19.000.000	18.425.100	97%
1	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<u>19.000.000</u>	<u>18.425.100</u>	97%
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.000.000	18.425.100	97%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sasaran II			
	<i>Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	14.157.393.540	12.285.288.426	87%
	Indikator :			
	<i>Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>			
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	297.691.000	220.483.600	74%
1	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<u>297.691.000</u>	220.483.600	74%
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	261.060.200	191.086.800	73%
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	36.630.800	29.396.800	80%
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.005.219.740	7.421.888.862	93%
1	<u>Pembangunan Prasarana</u>	<u>7.515.612.740</u>	<u>7.168.274.728</u>	<u>95%</u>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<u>Pertanian</u>			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.363.790.100	1.273.853.828	93%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.029.986.100	4.892.746.400	97%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.121.836.540	1.001.674.500	89%
<u>2</u>	<u>Pengembangan Prasarana Pertanian</u>	<u>489.607.000</u>	<u>253.614.134</u>	<u>52%</u>
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	346.561.000	166.959.134	48%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	143.046.000	86.655.000	61%
VII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.901.798.900	2.252.332.481	78%
<u>1</u>	<u>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</u>	<u>2.901.798.900</u>	<u>2.252.332.481</u>	<u>78%</u>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.949.519.200	1.451.689.060	74%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	952.279.700	800.643.421	84%
VIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.952.683.900	2.390.583.483	81%
<u>1</u>	<u>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</u>	<u>2.952.683.900</u>	<u>2.390.583.483</u>	<u>81%</u>
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.278.683.900	1.805.648.077	79%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	424.000.000	386.427.406	91%
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	250.000.000	198.508.000	79%
	Sasaran III			
	<i>Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi</i>	<i>85.004.900</i>	<i>62.371.375</i>	<i>73%</i>
	Indikator :			
	<i>Persentase Jumlah produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi</i>			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
IX	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	85.004.900	62.371.375	73%
1	<u>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>85.004.900</u>	<u>62.371.375</u>	<u>73%</u>
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	73.301.000	53.675.800	73%
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	11.703.900	8.695.575	74%
	Sasaran IV			
	<i>Meningkatnya nilai SAKIP</i>	<i>27.410.896.008</i>	<i>23.860.524.182</i>	<i>87%</i>
	Indikator :			
	<i>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan</i>			
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.410.896.008	23.860.524.182	87%
1	<u>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>355.980.000</u>	<u>291.434.000</u>	<u>82%</u>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	291.075.000	269.449.500	93%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.500.000	-	0%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.025.000	3.980.000	40%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.380.000	18.004.500	40%
<u>2</u>	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>23.951.807.868</u>	<u>20.968.832.917</u>	<u>88%</u>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.546.018.380	19.865.322.489	88%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.405.789.488	1.103.510.428	78%
<u>3</u>	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>584.669.200</u>	<u>442.862.808</u>	<u>76%</u>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.927.000	32.400.000	90%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.012.900	106.121.100	80%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.479.300	25.167.100	80%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.250.000	29.196.500	93%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.000.000	249.978.108	71%
<u>4</u>	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>771.745.500</u>	<u>709.081.668</u>	<u>92%</u>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	295.430.500	282.275.568	96%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	18.817.400	46%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.493.000	200.134.900	96%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.822.000	207.853.800	92%
5	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>981.177.000</u>	<u>905.710.000</u>	<u>92%</u>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	393.177.000	372.710.000	95%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.000.000	533.000.000	91%
6	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>733.516.440</u>	<u>530.602.789</u>	<u>72%</u>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	733.516.440	530.602.789	72%
7	<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	<u>32.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>38%</u>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.000.000	12.000.000	38%

Untuk mencapai target indikator kinerja mutlak diperlukan dukungan dana sebagai input pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sasaran pertama didukung anggaran sebesar Rp. 764.111.550,- terealisasi sebesar Rp. 596.349.885,- (78%). Sasaran kedua sebesar Rp. 14.157.393.540,- terealisasi sebesar Rp 12.285.288.426,- (87%). Sedangkan sasaran ketiga didukung anggaran sebesar Rp 85.004.900,- terealisasi sebesar Rp 62.371.375,- (73%). Sedangkan sasaran keempat didukung anggaran sebesar Rp 27.410.896.008,- terealisasi sebesar Rp 23.860.524.182,- (87%). Prioritas anggaran adalah pada sasaran strategis yang kedua sebesar 33,38% dan pada sasaran strategis yang pertama adalah 1,80% dan sasaran strategis yang ketiga adalah 0,20% dan sasaran strategis yang keempat adalah 64,62%.

Persentase alokasi anggaran ini mempertimbangkan bahwa pada sasaran strategis pertama dan kedua merupakan proses on farm yang memerlukan dana besar seperti pembangunan infrastruktur terutama pembangunan lumbung pangan, rantai jemur, pembangunan rumah Rice Milling Unit (RMU), jalan pertanian, Jaringan irigasi dan alat mesin pertanian,

bantuan saprodi serta bimtek bagi kelompok tani. Sedangkan sasaran kedua lebih bersifat proses off farm yang merupakan penunjang dalam aplikasi system agribisnis di kelompok tani dan sertifikasi untuk mutu produk pertanian.

3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Walaupun demikian masih ada beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Permasalahan itu antara lain :

a) Urusan Ketahanan Pangan

1. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan.
Beralihnya fungsi lahan pertanian akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.
2. Ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari beras masih tinggi
3. Pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga belum optimal
4. Dari hasil uji laboratorium beberapa sampel pangan segar, masih ditemukan residu pestisida pada bahan pangan segar, khususnya sayuran
5. Masih dijumpai daerah rawan pangan dan gizi (stunting)
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan lumbung pangan yang berorientasi ekonomi

b) Urusan Pertanian

1. Manajemen usaha tani komoditas unggulan belum sepenuhnya dilakukan secara profesional sehingga belum bisa menjamin Kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk
2. Kelembagaan petani masih belum optimal sehingga perlu diberikan bimbingan dan pendampingan
3. Anomali iklim yang tidak bisa dikendalikan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman
4. Jaringan pemasaran belum sepenuhnya bisa menyalurkan distribusi produk pertanian kepada konsumen.
5. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian
6. Teknologi pertanian yang aplikatif dan spesifik lokasi belum sepenuhnya bisa diadopsi dan diterapkan oleh petani

Terhadap kondisi yang ada di atas maka usaha yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah :

● Urusan Ketahanan Pangan :

1. Memaksimalkan ketersediaan bahan pangan pokok untuk pembangunan ketahanan pangan;

2. Mengoptimalkan Program Percepatan Penganekaragaman sumber daya alam untuk pengembangan pangan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan lembaga pembelian gabah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan dukungan regulasi stabilitas harga;
4. Perbaikan infrastruktur jalan sebagai sarana distribusi guna peningkatan ketahanan pangan daerah sampai tingkat rumah tangga;
5. Memaksimalkan penganekaragaman pangan lokal agar masyarakat kecil mampu membeli sehingga dapat menekan angka gizi buruk di daerah rawan pangan;
6. Adanya rekrutmen penyuluh swadaya untuk memenuhi kebijakan 1 desa 1 penyuluh;
7. Melakukan kegiatan penyuluhan keamanan pangan untuk mengurangi penggunaan zat tambahan makanan yang berbahaya.

● Urusan Pertanian :

1. Adanya jaringan pemasaran yang menyediakan informasi pasar dan promosi produk unggulan.
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya petugas dalam rangka aplikasi teknologi kepada petani

3. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam untuk pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
5. Penanganan pasca panen Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan.
6. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi permintaan pasar dan memperoleh daya saing

Langkah dimasa depan yang akan dilakukan dalam peningkatan capaian pada empat sasaran strategis di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan :

- 1) Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Keamanan Pangan
 - Program Diversifikasi Pangan: Mendorong petani untuk menanam beragam jenis pangan lokal selain beras, seperti jagung, kedelai, sayuran, dan buah-buahan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas pangan dan meningkatkan keberagaman konsumsi pangan di masyarakat.
 - Promosi Konsumsi Pangan Lokal: Kampanye untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal yang lebih bergizi, dengan fokus pada penyuluhan tentang manfaat gizi dari berbagai jenis pangan lokal.

- Keamanan Pangan: Memastikan bahwa pangan yang tersedia tidak hanya cukup, tetapi juga aman dan bergizi bagi masyarakat dengan mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik.

2) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Pertanian

- Peningkatan Infrastruktur Penyimpanan dan Distribusi: Memperkuat infrastruktur distribusi pangan dan fasilitas penyimpanan untuk mengurangi pemborosan dan kerugian pangan, serta meningkatkan efisiensi distribusi pangan ke daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau.
- Pemanfaatan Teknologi Pertanian: Memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti pertanian presisi, penggunaan sistem irigasi yang efisien, dan sistem pemantauan hasil pertanian berbasis teknologi. Teknologi ini akan membantu petani meningkatkan hasil dan mengurangi kerugian.

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pelatihan Berkelanjutan untuk Petani dan Penyuluh: Meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dengan pelatihan yang fokus pada teknik pertanian modern, keberlanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien.

- Peningkatan Keterampilan Teknis dan Manajerial: Memberikan pelatihan kepada petani tentang manajemen pertanian yang lebih baik, termasuk teknik pasca-panen dan pemasaran hasil pertanian.
- Pemberdayaan Petani Muda: Mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian dengan memberikan pelatihan dan insentif, serta menciptakan peluang usaha berbasis pertanian.

4) Optimalisasi Program Penyuluhan Pertanian

- Pendekatan Berbasis Teknologi Digital: Memanfaatkan teknologi digital untuk penyuluhan pertanian, seperti aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang pertanian, iklim, harga pasar, dan pengelolaan tanaman.
- Pendampingan dan Pemantauan: Memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada kelompok tani untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan diterapkan secara efektif, serta melakukan pemantauan hasil dari pelatihan yang diberikan.

5) Kolaborasi Antar Sektor dan Pihak Swasta

- Kerja Sama dengan Sektor Swasta: Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan rantai pasok pangan, serta dalam menyediakan alat dan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.
- Sinergi dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan solusi berbasis

riset dan inovasi dalam bidang pertanian yang dapat diterapkan di Kabupaten Pasuruan.

- Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok tani dan organisasi masyarakat sipil, dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan.

6) Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

- Sistem Monitoring Berbasis Data: Meningkatkan penggunaan data untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan. Sistem berbasis data akan membantu mengidentifikasi permasalahan lebih cepat dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
- Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi rutin terhadap hasil yang dicapai dalam setiap program dan kegiatan. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan program.

7) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- Pertanian Berkelanjutan: Mengembangkan program pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan penggunaan pupuk serta pestisida secara efisien.
- Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Mempersiapkan petani untuk menghadapi perubahan iklim dengan memberikan informasi tentang pola

cuaca dan cara-cara untuk menyesuaikan teknik pertanian sesuai dengan kondisi cuaca yang berubah.

8) Pengembangan Cadangan Pangan dan Ketahanan Pangan Lokal

- Peningkatan Cadangan Pangan: Mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan daerah, sehingga pangan tetap tersedia di saat-saat krisis atau ketidakseimbangan pasokan.
- Peningkatan Sistem Distribusi Pangan: Memperkuat sistem distribusi pangan lokal untuk memastikan pangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau terdampak bencana alam.



BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, bahwa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 adalah adanya peningkatan dan pengembangan usaha pertanian. Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk menfokuskan sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2024.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2024 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) tahun sebelumnya dari core bussines Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas, karena Rencana Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Secara umum dari dua Tujuan dan empat sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dapat dijelaskan sebagai berikut, Tujuan I, yaitu Meningkatnya Keanekaragaman Pangan, bertujuan untuk meningkatkan variasi dan keberagaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini penting karena keanekaragaman pangan yang baik dapat meningkatkan ketahanan pangan, mendukung kesehatan yang optimal, dan mengurangi ketergantungan pada sejumlah sumber pangan tertentu yang mungkin rentan terhadap krisis atau perubahan iklim. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan adalah pola konsumsi pangan yang terdiri dari berbagai jenis makanan dengan proporsi yang seimbang, mencakup berbagai kelompok pangan yang dibutuhkan tubuh. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh asupan gizi yang memadai untuk kesehatan. Target Kinerja untuk indikator ini adalah 93,5, yang berarti diharapkan masyarakat dapat mengonsumsi pangan dengan pola yang mendekati atau lebih tinggi dari angka tersebut. Realisasi Kinerja tercatat sebesar 89,40, yang menunjukkan bahwa hasil yang tercapai sedikit di bawah target yang ditetapkan. Capaian Kinerja sebesar 95,6% berarti meskipun hasilnya belum mencapai target yang ditentukan, capaian ini masih tergolong cukup baik dan mendekati target yang diinginkan. Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit selisih antara target dan realisasi, pencapaian ini menunjukkan progres yang positif dalam upaya meningkatkan keanekaragaman pangan di masyarakat. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memperbaiki pola makan masyarakat yang lebih beragam dan bergizi, meskipun

ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa depan. Sasaran I Meningkatnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator Rasio ketersediaan pangan utama dapat terealisasi sebesar 2,89 atau mencapai 102,12%, kemudian Tujuan II Meningkatnya produksi subsektor pertanian dengan indikator Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian dan Perkebunan target 0.2% masih belum bisa dihitung disebabkan menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan yang diperkirakan pada bulan April tahun 2025. Sasaran II Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan target 0,7% dapat terealisasi 0,75% atau mencapai 107,5%, sasaran III meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi terealisasi 63,16% atau mencapai 103,3% dan sasaran terakhir meningkatnya nilai SAKIP terealisasi 83,20 atau mencapai 100,12%.

Secara keseluruhan, pencapaian yang telah dicapai menunjukkan adanya progres yang cukup baik dalam bidang ketahanan pangan, produksi pertanian, dan peningkatan kualitas usaha pertanian. Beberapa sasaran sudah terlampaui, seperti dalam hal ketersediaan pangan, produktivitas tanaman pangan, dan usaha pertanian yang terstandarisasi. Namun, beberapa tantangan masih ada, seperti ketergantungan pada data eksternal untuk menghitung pertumbuhan subsektor pertanian dan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian.

Masih ada ruang untuk meningkatkan pencapaian dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan keanekaragaman pangan, dan pemantapan data serta sistem yang mendukung keberhasilan program-program tersebut.

Dengan menganalisa kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama petani hingga memperoleh beberapa penghargaan diantaranya Award Peduli Ketahanan Pangan Tahun 2024 pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 44 Prov. Jawa Timur, Juara 1 Stand Terbaik Agribisnis Festival (Agrifest) Tahun 2024 pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 44 Prov. Jawa Timur, Juara III Lomba Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Pertanian (Krenotek Tani) provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang diterima oleh Synta Shofiatul Khusniah.

Sebagai kata akhir, kami mengharapkan agar LKjIP tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder, serta dapat dijadikan acuan bagi pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2024. Realisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari Pimpinan, Pejabat Struktural serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Semoga Laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di masa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja serta sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and good government) serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. LILIK WIDJI ASRI, M.MA.
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.
Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pasuruan, 3 Januari 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

Pj. BUPATI PASURUAN


Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.


Ir. LILIK WIDJI ASRI, M.MA.
Pembina Utama Muda
NIP 196602171994032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<u>Tujuan I</u> Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	-	93,5
	<u>Sasaran 1.1</u> Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	-	2,83
2	<u>Tujuan II</u> Meningkatnya produksi subsektor pertanian	1. Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	Persen	0.2%
		2. Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	Persen	0.2%
	<u>Sasaran 2.1</u> Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
		1. Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	Persen	0,7%
		2. Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	Persen	0,7%
		3. Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	Persen	0,7%
		4. Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	Persen	0,7%
		5. Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	Persen	0,7%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	<u>Sasaran 2.2</u> Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase Jumlah produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	Persen	61,11%
	<u>Sasaran 2.3</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	-	83,10

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	400.660.350	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	647.438.700	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	375.000.000	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	67.589.800	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.084.832.182	APBD
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.799.454.016	APBD
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.492.472.640	APBD
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	172.749.000	APBD
9	Program Penyuluhan Pertanian	3.603.779.210	APBD
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	90.004.900	APBD

Pasuruan, 3 Januari 2024

Pj. BUPATI PASURUAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN


Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.


Ir. LILIK WIDJI ASRI, M.MA.
Pembina Utama Muda
NIP 196602171994032003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. LILIK WIDJI ASRI, MMA
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA., CIHCM
Jabatan : P.J. Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pasuruan, 24 September 2024

Pj. BUPATI PASURUAN

Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA., CIHCM

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN

Ir. LILIK WIDJI ASRI, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 196602171994032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<u>Tujuan I</u> Meningkatnya Keanekaragaman Pangan	Pola Pangan Harapan	-	93,5
	<u>Sasaran 2.1</u> Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Rasio ketersediaan pangan utama	-	2,83
2	<u>Tujuan II</u> Meningkatnya produksi subsektor pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Pertanian	%	0.2
		Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Perkebunan	%	0.2
	<u>Sasaran 2.1</u> Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
		1.1 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	%	0,7
		1.2 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	%	0,7
		1.3 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	%	0,7
		1.4 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	%	0,7

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		1.5 Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	%	0,7
	<u>Sasaran 2.2</u> Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase Jumlah produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	%	61,11
	<u>Sasaran 2.3</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	-	83,10

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.660.350	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	432.026.700	APBD
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	262.424.500	APBD
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19.000.000	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.410.896.008	APBD
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.901.798.900	APBD
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.005.219.740	APBD, DAK, DBHCHT
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	297.691.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
	PERTANIAN		
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.952.683.900	APBD, DAK, DBHCHT
10	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	85.004.900	APBD

Pasuruan, 24 September 2024

Pj. BUPATI PASURUAN



Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA., CIHCM

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Ir. LILIK WIDJI ASRI, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 196602171994032003



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci KM.9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
E-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Nomor : X.700.1.2.7/ IV.07.02/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024
Lampiran : -
Satuan Kerja : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 700.1.2.1/816/424.060/2024 tanggal 24 Juni 2024.

b. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
3. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
4. Pengembangan prasarana pertanian dan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
6. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
7. Penyusunan program penyuluhan;
8. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
9. Pengelolaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
11. Pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
12. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja) Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **83,05** dengan kategori **A (Memuaskan)**, hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyelaraskan target kinerja pada setiap dokumen perencanaan.	Identifikasi target kinerja pada dokumen RKT, Renja dan Renstra.
2.	Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu.	Monitoring melalui Laporan Kinerja individu triwulanan.
3.	Memanfaatkan hasil Pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.	Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait pengukuran kinerja secara berkala untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
4.	Memanfaatkan Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam perjanjian kinerja dan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.	-
5.	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait perbaikan kinerja

II. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
----	---	------	--

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,50	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,05	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,05	83,20

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala.
- b. Setiap level organisasi sebagian belum melakukan pemantauan menyeluruh atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara berkala yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, hambatan, dan ancaman dalam segi perencanaan dan implementasi program dan kegiatan.
- Melakukan pemantauan menyeluruh atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien.
- Memanfaatkan informasi dalam dokumen Laporan Kinerja untuk penyesuaian aktivitas kinerja dan perbaikan perencanaan, baik baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam perjanjian kinerja dan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **83,20** dengan kategori **A (Memuaskan)**, yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.



**Pih. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

MARIATI, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19821121 200112 2 001

Lampiran :
Nomor : 521/617/424.091/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Menyelaraskan Target kinerja pada setiap dokumen perencanaan	Identifikasi Target Kinerja pada Dokumen RKT, Renja dan Renstra	Dok RKT2024, Renja dan Renstra	Januari - Maret 2024	DKPP, Bapelitbangda	Selesai (100%)
2	Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu	Monitoring melalui Laporan Kinerja individu triwulanan	Lapkin Triwulanan	Januari 2024	DKPP	Selesai (100%)
3	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja	Telah dilaksanakan Rapat koordinasi terkait pengukuran kinerja secara berkala untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja	Laporan dan dokumentasi	Januari 2024	DKPP	Selesai (100%)
4	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait perbaikan kinerja	Laporan dan dokumentasi	Januari 2024	DKPP	Selesai (100%)

Pasuruan, 19 Agustus 2024



Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Kabupaten Pasuruan

NIKOLIK WIDJI ASRI, MMA
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196602171994032003

PENGHARGAAN TAHUN 2024



Award Peduli Ketahanan Pangan Tahun 2024 pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 44 Prov. Jawa Timur penerima PJ.

BUPATI PASURUAN - Dr. Nurkholis, S.Sos, M.Si , CIPA, CIHCM



Juara 1 Stand Terbaik Agribisnis Festival (Agrifest) Tahun 2024 pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 44 Prov. Jawa Timur
penerima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan



Juara III Lomba Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Pertanian (Krenotek Tani) provinsi Jawa Timur tahun 2024 penerima Synta Shofiatul Khusniah